
KOMODIFIKASI OTORITAS KIAI DALAM KONTESTASI POLITIK (STUDI KOMODIFIKASI OTORITAS KIAI DI KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN)

Hisnuddin Lubis¹, Nelly Rohmatillah

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo
Madura dan Institut Agama Islam Qamaruddin Gresik

¹Email : hisnuddin.lubis@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Kiai merupakan gelar kultural dalam masyarakat Madura yang memiliki otoritas tersendiri termasuk dalam urusan politik. Habitus dan modal kiai berperan penting dalam arena kontestasi politik di Kabupaten Pamekasan Madura. Otoritas kiai ini seringkali dijadikan komoditas dalam proses kontestasi politik. Komodifikasi ini dapat diidentifikasi dengan adanya pertukaran sumberdaya nilai guna menjadi nilai materiil. Kajian ini menggunakan perspektif habitus arena dari Bourdieu dan perspektif komodifikasi dalam pandangan postmodernisme. Pendekatan kajian ini menggunakan studi kasus dalam bingkai metode kualitatif berlokasi di kecamatan Pasean Pamekasan Madura. Didalam penelitian ini ditemukan : adanya akumulasi habitus kiai dan tradisi masyarakat dengan modal budaya baik *embodied*, *objectified* maupun *institutionalized* yang membentuk otoritas kiai. Habitus kiai berupa keturunan dan proses pendidikan agama yang panjang. Sementara modal budaya kiai berupa warisan keturunan, lembaga pesantren dan legitimasi institusi atas kapasitas intelektualnya. Sejalan kemudian otoritas kiai digunakan untuk kepentingan kontestasi politik dengan berpartisipasi langsung sebagai kontestan maupun sebagai “*political broker*” untuk memenangkan kontestan tertentu. Dalam proses ini terdapat pertukaran sumberdaya otoritas dengan imbalan materiil dan non materiil. Proses inilah yang kemudian disebut sebagai komodifikasi otoritas kiai dalam kontestasi politik. Dalam logika *commodity fetishism* otoritas kiai terus diproduksi sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan dengan nilai materiil maupun non materiil untuk memenuhi hasrat “kapitalis politik”.

Kata kunci : Kontestasi Politik; Komodifikasi; Habitus dan Modal Kiai

COMMODIFICATION OF KIAI'S AUTHORITY IN POLITICAL CONTESTATION (COMMODIFICATION STUDY OF KIAI'S AUTHORITY IN PASEAN, PAMEKASAN DISTRICT)

Abstract

Kiai is a cultural degree in Madurese society has own authority in society. Habitus and kiai's capital an important role in the arena of political contestation. Often, Kiai's authority used as a commodity in the political contestation. This commodification can be identified by the exchange of usefull value resources into material values. This study uses the perspective of Habitus arena from Bourdieu and the commodification perspective in postmodernism. This study approach uses a case study in the frame of a qualitative method, located in the Pasean Pamekasan Madura . The findings : there an accumulation of Habitus kiai and community traditions with cultural capital which form the authority of the kiai. The kiai Habitus is descendant and process of religious education. The cultural capital of the kiai in the form of inheritance, pesantren institutions and institutional legitimacy of their intellectual capacity. the authority of the kiai is used for the political contestation, By participating as a contestant or as a political broker. there are exchanges of resources with material and non-material rewards. This is referred to commodification of the kiai's authority in political contestation. the authority of the kiai continues to be produced as a commodity that can be exchanged with material and non-meterial values.

Keyword : Political Contestation; Commodification; Habitus and Modal of Kiai

LATAR BELAKANG

Realitas politik menunjukkan bahwa beberapa kelompok atau golongan tertentu memiliki peran yang strategis dalam kontestasi politik. Peran tersebut terepresentasi dalam mobilisasi massa, mempengaruhi opini publik hingga mobilisasi dalam proses pemilihan umum. Kelompok atau golongan ini biasanya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh budaya. Indikasi “kekuatan politis” mereka dapat kita amati dengan seringnya para tokoh politik, pejabat Negara berkunjung kepada tokoh masyarakat maupun institusi sosial yang merupakan representasi kelompok tertentu (Setiadi & Kolip, 2013).

Salah satu kelompok yang berpengaruh adalah kiai sebagai tokoh agama. Kiai merupakan gelar kultural yang secara historis berakar dari tradisi Jawa. Dalam terminologi ini kiai memiliki tiga makna, *pertama* kiai merupakan sebutan masyarakat bagi sesuatu yang dihormati, dikeramatkan dan disakralkan. Kiai slamet misalnya sebutan untuk kerbau yang dikeramatkan di lingkungan keraton Yogyakarta. Kiai Plered sebutan untuk senjata yang dikeramatkan. *Kedua* gelar untuk orang tua dan yang di hormati secara umum. *Ketiga* gelar kehormatan bagi seorang ahli agama Islam baik memiliki pesantren maupun tidak dan mengajarkan beberapa kitab klasik. Dalam tulisan ini, kiai yang dimaksud adalah dalam pengertian yang ketiga.

Bagi masyarakat, kiai sebagai gelar seseorang menunjukkan kualitas keilmuan, kesalehan sosial, menjadi rujukan bagi masyarakat berkonsekuensi penghormatan kepada sang kiai. Kiai dalam tradisi masyarakat seringkali dikaitkan dengan dimensi mistis spiritual yang seringkali mewarnai kehidupan tradisi masyarakat tradisional. Kiai dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat paternalistik, dalam tradisi Jawa kiai merupakan figure yang dianggap tepat dalam mengambil keputusan. Keputusan kiai tidak hanya sebatas pada urusan keagamaan melainkan hingga persoalan politik (Dhofier, 1994).

Sebagaimana di Jawa, kiai dalam konteks masyarakat Madura juga dianggap

sebagai tokoh sentral yang memiliki “kekuasaan” sosial dalam dinamika kehidupan masyarakat. *Buppa Babu Guru Ratu* merupakan ungkapan stratifikatif dalam masyarakat Madura yang seringkali dijadikan dasar penempatan kiai sebagai figure kedua setelah orang tua. (Rifai, 2007). Oleh karenanya, secara sosiologis kiai di Madura seringkali menjadi *Opinion Leader* yang menjadi rujukan “fatwa rekomendasi” pada saat *electoral process*. Keberadaan kiai merupakan salah satu kekuatan yang mampu mewarnai proses politik dari luar lingkaran kekuasaan. Kondisi demikian, tidak lepas dari orientasi budaya politik masyarakat yang cenderung berorientasi kognitif dan afektif hingga melahirkan tipe budaya politik parokial (Setiadi & Kolip, 2013. Kantaprawira, 2004).

Kiai Madura hingga saat ini merupakan kekuatan politik yang patut diperhitungkan. Hal ini dapat kita lihat banyaknya kiai Madura yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (baik daerah maupun pusat) dan Kepala daerah. Bukti tersebut dapat kita telusuri dari Kabupaten Bangkalan periode 2013- 2018 dipimpin oleh trah kiai, Kiai Makmun Ibnu Fuad, yang merupakan putra bupati dua periode sebelumnya yakni KH. R. Fuad Amin Imron. Dan saat ini (2018 – 2023) dilanjutkan oleh sepupunya. Di Kabupaten Sampang kurang lebih sama, Bupati Sampang periode 2013-2018 juga dipimpin oleh trah kiai, KH. Fannan Hasib. Di Kabupaten Pamekasan juga tidak jauh berbeda, KH Kholilurrahman (mantan bupati periode 2008-2013 sekarang merupakan anggota DPR-RI periode 2014-2019). Sementara di Kabupaten Sumenep periode 2010-2015 juga dipimpin oleh salah seorang kiai berpengaruh, KH. A. Busyro Karim (Syarif, 2016).

Sementara itu keterlibatan kiai dalam dunia politik khususnya di daerah pasean bukan hal baru lagi. Sebagian ikut dalam partai politik tertentu namun ada juga yang hanya mendukung dan menyatakan sikap saja kepada masyarakat tanpa ikut dalam partai politik. Beberapa tokoh seperti KH. K, S.Pd,I, M.Pd.I (menggunakan inisial) yang merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren di Pasean,

beliau merupakan mantan anggota DPRD Jatim, Kiai S, S.Pd. beliau merupakan kiai yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Jatim tahun 2014-2019. Sedangkan kiai yang hanya menyatakan sikap, diantaranya pada pemilihan bupati pamekasan 2018-2022 diantaranya KH. SK, Kiai MD.

Selain menjadi tokoh agama dan tokoh masyarakat, kiai di Madura banyak yang terjun menjadi tokoh politik. Realitas politik Madura menempatkan kiai sebagai *opinion leader* menjadikan kiai dan otoritasnya sebagai komoditas politik tidak jarang kiai beralih “profesi” menjadi broker politik untuk mendapatkan “keuntungan” dalam proses politik (Syarif, 2016). Dalam perspektif lain (Zamroni, 2012) menyatakan bahwa dinamika dan relasi kuasa antar elit lokal di Madura termasuk kiai pada umumnya dibangun diatas pondasi kepentingan politi dan konstelasi kekuasaan.

Pemanfaatan otoritas kiai dalam kontestasi politik merupakan gambaran kecil dari *commodity fetishism* yang menggambar hasrat produksi barang dan jasa yang menggelora dalam masyarakat kapitalis. Otoritas kiai tidak lagi dipandang sebagai kearifan lokal, yang memiliki nilai fungsi dan guna melainkan sebagai komoditas yang memiliki nilai tukar. Kiai tidak hanya dipandang sebagai tokoh agama, produk kultural yang selektif, melainkan dipandang sebagai komoditas politik yang memiliki nilai tukar, nilai sosial tergantikan dengan nilai “pasar” politik dengan daya tukarnya dalam kontestasi politik (Smith.D & Evans. P. 2004). Bahkan menurut Bisri (2008) tipologi Kiai saat ini dapat “diproduksi” sehingga melahirkan tipe kiai produk pemerintah dan kiai produk pers yang masing masing jauh berbeda dengan kiai dari produk masyarakat yang melalui tahap *quality control* yang ketat (Bisri, 2008).

Kiai dan politik di Madura ini merupakan realitas sosiologis dimana modal budaya dan habitus masyarakat secara simultan berproses menghasilkan karakteristik budaya politik parokial kedaerahan. Struktur mental kognitif masyarakat yang

menghubungkan dengan dunia sosial melalui skema internalisasi untuk melahirkan persepsi, pemahaman, apresiasi, dan evaluasi atau kemampuan menilai terhadap dunia sosial (Bourdieu dalam Ritzer & Goodman, 2014). Sementara itu “dominasi” kiai di Madura ini dapat kita lihat sebagai bentuk aktualisasi kekuasaan. Pada hakikatnya dominasi dimaksud tergantung atas situasi, sumber daya (kapital) dan strategi pelaku (Halim, 2014).

Realitas politik ini menarik untuk dikaji, dimana kiai sebagai *opinion leaders* dengan modal budaya, habitus masyarakat memiliki dominasi kekuasaan dikomodifikasi untuk kepentingan golongan. Terlepas dari nilai baik dan buruk, realitas ini menarik untuk dikaji dalam perspektif sosiologi dengan pendekatan habitus masyarakat dan modal budaya sebagai analisis sumber kekuatan kiai dan commodity fetishism untuk menjelaskan fenomena yang mengiringinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Informan subyek dalam penelitian adalah kiai, santri, wali santri dan masyarakat sekitar. Pemilihan informan ini didasarkan pada teknik *purposive sampling*. Data yang diperoleh di uji keabsahannya dengan triangulasi sumber. Artinya data yang diperoleh dikroscek ulang dengan membandingkan data dari sumber data yang berbeda sebelum akhirnya dianalisis untuk mendapatkan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kiai sebagai kelompok stratifikatif dalam masyarakat Madura memiliki kedudukan yang cukup diperhitungkan dalam dinamika politik di Madura. Peran dan pengaruh kiai tidak terbatas urusan agama saja, melainkan menyentuh pada dunia sosial lain, politik ekonomi dan lainnya. Zamroni 2007 misalnya, mengkaji kompleksitas aktor dibalik tataniaga tembakau Madura – dinamika politik dimana Juragan dan Kiai memiliki peran yang

signifikan. Signifikansi kiai di Madura juga menarik Suryanto (2008) yang mencoba melihat genealogi kekuasaan kiai Madura dimana kiai sebagai aktor utama yang memiliki kekuasaan atas masyarakat-santri melalui proses konstruksi sosial yang panjang.

Berbagai kajian kiai di Madura menemukan satu titik otoritas sosial yang dibangun atas modal budaya dan habitus masyarakat dengan nilai lokalitas yang menempatkan kiai sebagai tokoh sentral. Seiring dengan perkembangan masyarakat, otoritas kiai yang dibangun melalui *traditional* dan *charismatic domination* (Syarif, 2016) ini menarik banyak perhatian pihak untuk memanfaatkannya dalam proses kontestasi politik. Meminjam istilah Marx *commodity fetishism* otoritas kiai ini dianggap sebagai komoditas yang tidak sekedar memiliki nilai guna dan manfaat melainkan di pertukarkan sebagai komoditas politik. Proses ini yang kemudian para ilmuwan sosial disebut sebagai komodifikasi.

Peran kiai dalam politik sesungguhnya bukanlah hal baru. Dinamika partisipasi politik kiai digambarkan Purwoko dalam Rijal (2014) bahwa pentas politik elit agama (Kiai) di Indonesia setidaknya dapat dilacak dalam tiga periode. *Pertama* periode 1945 – 1965, para elit agama berperan aktif sebagai subyek politik dalam kancah politik nasional. *Kedua* masa orde baru, masa ini peran elit agama dibatasi oleh kekuasaan pemerintah. *Ketiga* periode antara 1998 – 2006 pasca reformasi. Pada masa ini terjadi revitalisasi peran kiai dalam konstelasi politik nasional.

Habitus dan Modal kiai dalam kontestasi politik

Meminjam istilah kontes, proses seleksi untuk mendapatkan yang terbaik dalam “kompetisi” para aktor di dalamnya. Kontestasi politik dalam kajian ini merujuk kepada proses pemilihan umum, dimana terdapat beberapa aktor (kontestan) yang bersaing untuk mendapatkan dukungan suara terbanyak untuk menjadi pemenang. Untuk dapat bersaing dalam arena kontestasi politik ini, para kontestan setidaknya harus memiliki

sumberdaya modal yang dijadikan “senjata” dalam arena kontestasi.

Fakta sosial kiai dengan otoritasnya terbangun atas adanya fakta dalam masyarakat Pasean yang dapat diringkaskan sebagai berikut : *pertama* Budaya “*buppa*’, *babbu*, *guru*, dan *rato*” yang menempatkan kiai sebagai sosok yang harus dihormati setelah kedua orang tua. *Kedua* Adanya tradisi *acabis* dalam berbagai urusan seperti urusan agama, pengobatan, rizki, jodoh, membangun rumah, bercocok tanam, konflik sosial, karier, politik, dan sejumlah problema hidup lainnya. *Ketiga* hubungan kiai dan masyarakat tidak terbatas pada hubungan lahiriyah (syariat) melainkan juga hubungan bathiniyah (Thoriqot). *Keempat* adanya dimensi mistis yang dilekatkan kepada kiai, dianggap sebagai sosok linuwih yang melihat realitas dengan dimensi *transcendental* secara epistemologis digolongkan dalam illuminosianisme. *Kelima* loyalitas jamaah atau santri yang dalam perspektif lain lain dianggap sebagai hubungan Patron klien (disimpulkan dari wawancara mei-juni 2018).

Otoritas kiai dalam masyarakat hingga menyentuh wilayah politik ini terbangun atas adanya modal budaya yang dimiliki kiai dan habitus masyarakat dalam menempatkan kiai dalam posisi khusus dalam masyarakat. Untuk memudahkan pembahasan habitus dalam konteks ini dipetakan menjadi dua, habitus kiai dan habitus masyarakat sekitar kiai. Habitus kiai merupakan struktur kognitif yang *menstrukturkan* struktur kiai dalam masyarakat pada sosisi tertentu dengan sumberdaya yang dimiliki oleh kiai itu sendiri. Sementara habitus masyarakat sekitar merupakan nilai yang terbangun sebagai struktur yang mewarnai persepsi, apresiasi dan evaluasi kepada kiai dan bersumber dari tradisi dalam masyarakat (Ritzer & Goodman, 2014).

Habitus kiai di kecamatan Pasean ini secara fenomenologis merujuk kepada bagaimana seseorang menjadi kiai dengan otoritas yang diberikan oleh masyarakat. Status kiai didapatkan melalui dua jalur, pertama dari jalur keturunan dan kedua dari jalur pendidikan. Kiai dari jalur keturunan tidak hanya dilihat dari keilmuan agama yang

dimiliki. “warisan” gelar ini sejak lama diturunkan dari orang tua sang kiai. Dalam perspektif masyarakat Jawa disebut sebagai “kramat Gantung” artinya kehormatan yang didapatkan dari “hibah” orang tua secara turun temurun.

Sementara itu, kiai dari jalur pendidikan mendapatkan gelar kiai dan otoritasnya melalui proses mondok di pondok pesantren, belajar ilmu agama hingga mencapai titik dimana masyarakat secara selektif memberikan “legitimasi” sebagai kiai kepadanya. Proses ini tidak sesederhana kiai karena keturunan, kiai yang tidak memiliki garis keturunan kiai, melalui berbagai “uji kompetensi” sebagai “standard sertifikasi” masyarakat melalui habitus masyarakat yang terepresentasi dalam tradisinya masing masing.

Sementara itu, modal budaya kiai di kecamatan Pasean secara konseptual dapat dipetakan menjadi modal budaya *embodied*, *objectified* dan *institutionalized* (Bourdieu, 2015) Modal budaya *embodied* kiai di Pasean merupakan modal yang dimiliki kiai dan didapatkan secara turun temurun (warisan). Dimana masyarakat secara umum mengenal bahwa sosok kiai tersebut memiliki garis keturunan kiai. Dalam kategori ini, kiai AS dan Kiai AK mendapatkannya dari warisan orang tua beliau. Modal budaya *objectified* merupakan modal kiai yang bersifat fisik yang menjadi indikator ke-kiai-an seseorang. Modal jenis ini biasanya berupa lembaga pendidikan pesantren. Sementara itu modal *institutionalized* merupakan pengakuan atas kapasitas intelektual kiai sesuai bidang yang dijadikan perspektif dalam melihatnya. Modal ini dapat berupa ijazah formal pendidikan tinggi keagamaan maupun pengakuan dari “institusi” yang secara umum diakui masyarakat sebagai tolak ukur kapasitas kiai, misalnya mursyid toriqot, atau kiai yang secara kultural dianggap sebagai lebih senior / professional (wawancara dengan AK, AS – mei 2018).

Habitus dan modal merupakan satu kesatuan yang berproses dalam masyarakat hingga membentuk “struktur” dunia sosial. Kiai dan otoritasnya merupakan produk sosial

– religious yang dibangun dengan pondasi habitus dan modal berupa tradisi dan sumberdaya kiai melalui proses yang panjang. Akumulasi modal budaya dan habitus kiai di kecamatan Pasean saat ini membentuk “kekuatan” politis yang sewaktu waktu dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

Pemanfaatan sumberdaya (habitus dan modal) dalam arena kontestasi ini dapat digambarkan sebagaimana pertarungan kontestan dalam ajang kompetisi untuk mendapatkan pemenang. Kiai sebagai actor dengan sumberdaya berupa memenangkan kontestasi baik untuk dirinya, maupun golongan afiliasinya. Dalam proses kontestasi politik di kecamatan Pasean, terdapat dua tipe partisipasi kiai. *Pertama* kiai dengan sumberdayanya berupaya menjadi pemenang dalam kontestasi politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislative daerah, dan *kedua* kiai dengan sumberdayanya berupaya memenangkan individu atau kelompok (partai politik) yang berafiliasi dengannya. Kiai AK pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur dan Kiai S misalnya, merupakan kiai yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Jatim tahun 2014-2019. Sementara itu, kiai yang memanfaatkan sumberdayanya untuk memenangkan calon kontestan tertentu misalnya kiai SK dan Kiai MD. Peran kiai dalam kontestasi politik belakangan semakin nyata, baik yang secara formal menjadi bagian dari partai politik maupun hanya sekedar menjadi “vote getter” bagi partai politik dan kontestan politik tertentu (Rijal, 2014).

Persepsi politik Kiai dan komodifikasi kiai dalam kontestasi politik

Secara umum politik dapat diartikan sebagai strategi atau siasat untuk mendapatkan, mendistribusikan dan mempertahankan kekuasaan. Pemahaman politik ini dapat dilihat dalam Pendekatan Klasik, Pendekatan kelembagaan dan Pendekatan fungsionalisme serta Pendekatan Konflik (disarikan dari budiarjo, 2008, surbakti, 1999, Syafiie 2002). Politik dapat dilihat dari perspektif yang

berbeda: pertama politik dilihat sebagai usaha bersama untuk mencapai kebaikan bersama; kedua Politik dipahami sebagai proses penyelenggaraan pemerintah dan negara; ketiga politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat; dan keempat politik sebagai proses perumusan dan implementasi kebijakan publik (Setiadi dan Kolip, 2013).

Masyarakat sebagai warga Negara memiliki persepsi yang berbeda beda dalam memaknai politik, sesuai dengan tipologi budaya politik, persepsi politik memiliki peran penting dalam pembentukan tipe budaya politik yang berimplikasi pada partisipasi politis masyarakat. Kiai sebagai sub system masyarakat memiliki kebebasan dalam mem-^{persepsi}-kan politik dan dinamikanya dalam proses bernegara ini. Persepsi inilah yang kemudian menjadi salah satu indicator bagaimana aktifitas kiai dalam proses politik yang berlangsung.

Menurut kiai AK, politik merupakan seni untuk mendapatkan kekuasaan melalui strategi yang menguntungkan. Orientasi keuntungan adalah titik point dalam proses politik.

Politik itu sebetulnya kan seni untuk meraih kekuasaan. Jadi strategi untuk meraih kekuasaan itu politik dan politik itu harus betul-betul bisa menjalankan dan punya keuntungan dengan perjalanan politik, jangan malah menjadi tergilas karena politik (wawancara dengan K. AK pada Mei 2018).

Sementara itu kiai SL menganggap Politik sebagai upaya untuk mendapatkan otoritas kekuasaan melalui proses yang berliku dan membutuhkan manuver tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam islam sendiri dikenalkan istilah *siyasah* politik, artinya partisipasi politik ini sesungguhnya bagian dari implementasi ajaran islam selama dilakukan dengan prosedur dan cara yang benar. Menurut AK, kiai dalam politik harus proporsional, dapat menempatkan dirinya agar tidak dipersepsi negative oleh masyarakat.

Proses kontestasi politik di kecamatan Pasean melibatkan kiai dengan sumberdayanya untuk ikut serta berpartisipasi dalam arena politik. Modal yang dimiliki oleh seorang kiai menjadi hal yang menguntungkan kiai dalam kontestasi politik. Karena modal tersebut terbangun dari struktur masyarakat madura yang menghormati seorang kiai sebagai orang yang harus dikormati setelah ayah dan ibu yang tertuang dalam *spirit* madura "*buppa*", *babbu*, *guru*, dan *rato*.

Kiai AK dan kiai AS beberapa kali menjadi mitra partai beberapa politik ataupun beberapa kontestant politik dalam beberapa kontestasi politik baik dalam pemilihan presiden, gubernur, bupati ataupun kepala desa. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk membantu menyukseskan kemenangan beberapa calon dalam kontestasi politik. Salah satu mitra kiai AS adalah kiai AK sendiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam membantu memenangkan kiai AK dalam kontestasi politik menduduki kursi di DPRD.

Upaya pemanfaatan modal dalam kontestasi politik ini dapat dilihat dari *pertama* penggunaan kultus yang ada di masyarakat. Pengkultusan kiai sebagai sosok yang penuh barokah, dan keputusannya dianggap sebagai kebenaran ini merupakan modal potensial yang dapat dimanfaatkan oleh kiai dalam arena kontestasi politik. *Kedua* pemanfaatan santri, dan wali santri, dalam konteks ini kiai mengeluarkan "fatwa politik" kepada santri yang kemudian diteruskan oleh santri kepada keluarganya dalam rangka mobilisasi suara dalam pemilu. *Ketiga* memanfaatkan kegiatan sosial kegamaan. Seperti halnya di daerah lain, tradisi keagamaan seperti pengajian, seringkali melibatkan kiai didalamnya. Tidak jarang moment ini dimanfaatkan kiai baik secara terang terangan maupun secara terselubung untuk mensosialisasikan kontestan tertentu. *Keempat* mobilisasi melalui alumni, dalam konteks ini, kiai mengumpulkan alumni bahkan membentuk struktur dengan tujuan politis. Struktur yang dibentuk meliputi, pra pemilu, saat pemilu dan pasca pemilu. Dalam proses ini, alumni menjadi "mesin politik" non formal yang efektif bagi kiai dalam kontestasi

politik (wawancara juni, 2018). Sejalan dengan ini, Ma'ali (2015) menyatakan bahwa kiai berperan dalam mobilisasi massa melalui pendekatan persuasive kepada masyarakat memanfaatkan komunikasi non verbal dengan melalui stiker dukungan kepada calon tertentu. Selain itu, kiai juga memanfaatkan alumni, ustadz, saudagar, blater sebagai *mediator* dalam penyampaian pesan dukungan politik kepada masyarakat.

Proses pemanfaatan modal dan habitus dalam arena kontestasi politik ini dalam satu perpektif mempunyai konsekwensi adanya pertukaran sumberdaya, transaksi politik hingga bermuara pada komodifikasi modal dan habitus. Meminjam istilah Marx, komodifikasi dalam kajian ini merujuk pada adanya pertukaran nilai otoritas kiai yang diperoleh dari habitus dan Modal dengan sesuatu (materiil maupun non materiil) dalam proses transaksional kontestasi politik. Imbalan materi diterima kiai AS dalam mensukseskan anggota DPRD berupa Sapi, bantuan dana untuk lembaganya sebesar 25 Juta Rupiah. Sementara itu, bagi pemenang kontestasi pertukaran tersebut adalah sebuah kewajaran sebagai bentuk balas jasa. Dalam kontestasi pemilihan kepala Desa kiai AS pernah mendapatkan imbalan satu Unit Mobil karena dinilai paling berjasa dalam pemenangan kontestan kepala desa tersebut.

Selain pertukaran yang bersifat materiil, dalam komodifikasi ini juga terjadi pertukaran sumberdaya non materiil. Jaringan yang terbentuk mejadi daya tukar tersendiri karena dengan jaringan tersebut sang kiai dapat memanfaatkannya sewaktu waktu untuk kepentingannya. Selain itu, posisi strategis dalam partai politik juga menjadi imbalan diterima oleh kiai.

PENUTUP

Kiai memiliki otoritas tersendiri dalam masyarakat dengan habitus dan modalitasnya. Otoritas kiai di kecamatan pasean ini terbentuk atas akumulasi habitus kiai berupa keturunan dan pendidikan dan masyarakat berupa tradisi kultus dan penghormatan dengan Modal

kultural baik *embodied* berupa keturunan atau warisan keluarga, *objectified* berupa lembaga pesantren maupun *institutionalized* legitimasi institusi.

Proses ini melahirkan kondisi sosial berupa *pertama* Budaya yang menempatkan kiai sebagai sosok yang harus dihormati setelah kedua orang tua. *Kedua* Adanya tradisi *acabis* untuk berbagai kepentingan. *Ketiga* lahir bathin dengan masyarakat *Keempat* dimensi mistis yang dilekatkan kepada kiai, *Kelima* loyalitas jamaah atau santri. Otoritas kiai dalam satu titik tertentu menjadi komoditas (*komodifikasi*) yang dipertukarkan dalam kontestasi politik. Pertukaran nilai ini terjadi antara kiai dengan kontestan politik dalam Pemilihan umum. *Komodifikasi* terjadi dengan adanya pertukan dukungan kiai dengan imbalan yang bersifat materiil (dana bantuan, bantuan barang, mobil dll) maupun non materiil berupa posisi tertentu dalam partai politik.

Pertukaran sumberdaya kiai dengan kontestan politik seyogyanya bernilai guna yang lebih luas. Misalnya untuk kepentingan pengembangan kelembagaan kiai sehingga mempunyai nilai guna dan manfaat yang lebih besar dan dalam waktu yang lama. Model otoritas kiai dalam masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai *key person* dalam pembangunan yang lebih luas tidak terbatas pada kepentingan kontestasi politik.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Suryanto, Totok . (2008). *Kekuasaan Kiai Di Madura (Studi Genealogi Kekuasaan Kiai Di Dusun Tenggina Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura.)* Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Bisri, Mustofa, K.H.A. (2008). *Membuka Pintu Langit*, cet, Ketiga. Kompas : Jakarta.
- Bourdieu, Pierre. (2015). *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Terjemahan Yudi Santosa.

- Kreasi Wacana : Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1994). *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. LP3ES: Jakarta.
- Halim, Abd. (2014). *Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya*. LP2B: Yogyakarta.
- Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia Suatu model pengantar*. Sinar Baru Algesindo: Bandung.
- Ma'ali, Hasan. (2015). *Strategi Komunikasi Politik Kiai Dalam Sukses Pilpres 2014*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Rifai, Mien Ahmad. (2007). *Manusia Madura: Pembawaan, Prilaku, Etos kerja, Penampilan Dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasanya*. Pilar Media: Yogyakarta.
- Rijal, Syamsul. (2014). *Peran Politik Kiai dalam Pendidikan Pesantren*. TADRIZ. Vol.9 No.2 hal.203-225.
- Ritzer, G. dan Goodman, D. J. (2014). *Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Terjemahan Nurhadi. Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- Setiadi, Elly M & Kolip, Usman. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana Prenadamedia: Jakarta.
- Smith D. & Evans. P. (2004). *Das Kapital Untuk Pemula Resist Book*: Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami ilmu Politik*. Grasindo: Jakarta.
- Syafiie, Kencana Inu. (2002). *Sistem Politik Indonesia: Era Soekarno, Hatta, Syahrir, Aidit, Syafruddin. Era Soeharto, Moerdani, Wiranto, Harmoko, Habiebie: Era Gus Dur, Megawati, Amin Rais, Hamzah Has*. Refika Aditama: Bandung.
- Syarif, Zainuddin. (2016). *Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan*. Madura Al-Tahrir, Vol. 16, No. 2 November 2016 : 293-311.
- Zamroni, Imam. (2007). *Juragan, Kiai dan Politik di Madura*. UNISIA, V ol. XXX No. 65 September 2007. H. 264-276.
- Zamroni, Imam. (2015). *Dinamika Elit Lokal Madura*. MASYARAKAT, Vol.17 no.1 Januari 2012. Hal.23-48.